

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada hakikatnya pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan yang terus menerus ke arah perbaikan dan peningkatan kesejahteraan. Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga kemakmuran masyarakat semakin tinggi.

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang sedang mendapatkan perhatian pemerintah. Koperasi merupakan organisasi yang berbadan hukum. Pembangunan koperasi di Indonesia merupakan bagian dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Koperasi harus dibangun untuk menciptakan usaha dan pelayanan yang berdasar azas kekeluargaan. Usaha koperasi adalah usaha yang sesuai dengan demokrasi ekonomi, karena di dalam demokrasi ekonomi terdapat unsur-unsur usaha koperasi.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa :

“perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”.

Penjelasan Pasal 33 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral dari tata perekonomian Nasional.

Memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut di atas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Kegiatan ekonomi seperti ini koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi rakyat. Tapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya penerapan yang konsisten sesuai kaidah ekonomi dalam pengelolaan yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri.

Sebagai badan usaha, Koperasi harus dikelola secara profesional, sehingga pengurus yang mendapat amanah dari anggota untuk menjalankan aktivitas organisasi dan usaha Koperasi perlu memiliki pengetahuan yang luas mengenai cara pengelolaan Koperasi. Salah satunya adalah dalam pengelolaan keuangan. Hal ini sesuai dengan tugas pengurus sebagaimana dinyatakan dalam Ayat 1 Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 1992, antara lain yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan adalah: mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar; menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi (RAPBK) untuk diajukan kepada

Rapat Anggota; menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada Rapat Anggota; menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.

Keempat tugas pengurus yang terkait dengan manajemen keuangan di atas menunjukkan bahwa mengelola keuangan sangat terkait dengan keseluruhan aktivitas yang ada dalam Koperasi. Dalam hal ini manajemen keuangan Koperasi merupakan bagian dari manajemen Koperasi, yang dalam prakteknya dijalankan oleh pengurus dan diawasi oleh badan pengawas dan anggota. Pengawasan oleh anggota dipandang sebagai pengawasan yang paling efektif, hal ini dikarenakan identitas ganda yang dimiliki oleh anggota, yaitu sebagai pemilik Koperasi sekaligus juga sebagai pengguna jasa/layanan Koperasi.

Peningkatan literasi keuangan telah menjadi isu global. Pemberdayaan melalui literasi keuangan diyakini akan mendukung upaya pencapaian stabilitas sistem keuangan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang lebih inklusif.

Literasi keuangan dapat dikatakan sebagai kemampuan seseorang untuk mendapatkan, memahami, dan mengevaluasi informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan dengan memahami konsekuensi finansial yang ditimbulkannya (Krishna, 2010) melihat kondisi perekonomian saat ini, peran literalisasi keuangan menjadi lebih penting. Individu membutuhkan pengetahuan keuangan dasar serta *skill* untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif demi kesejahteraan hidupnya, terutama bagi seorang wirausaha yang sering melakukan aktivitas pengambilan keputusan terutama yang berhubungan dengan

keuangan perusahaan. Kurangnya literasi keuangan dapat mengakibatkan rendahnya akses ke lembaga keuangan dan menghambat kemakmuran.

Literasi keuangan terjadi ketika individu memiliki sekumpulan keahlian dan kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan. Huston (2010) menyatakan bahwa pengetahuan finansial merupakan dimensi yang tidak terpisahkan dari literasi keuangan, namun belum dapat menggambarkan literasi keuangan.

Literasi keuangan tidak terbatas pada pengertian pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan akan lembaga. Produk dan layanan jasa keuangan semata, namun sikap dan perilaku pun dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan literasi keuangan yang selanjutnya dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sikap dan perilaku keuangan yang bijak tercermin dalam kemampuan seseorang menentukan tujuan keuangan, menyusun perencanaan keuangan, mengelola keuangan dan mampu mengambil keputusan keuangan yang berkualitas dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan), Literasi keuangan (*financial literacy*) adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan, serta keterampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan baik. Secara singkat, literasi keuangan juga dapat diartikan sebagai pengetahuan atau kemampuan untuk mengelola keuangan. Hal ini juga disampaikan kembali oleh OJK (SNLKI Revisit 2017:17) bahwa literasi keuangan sudah menjadi life skill bagi setiap individu agar mereka dapat

merencanakan dan mengelola keuangan dengan baik untuk mencapai kesejahteraan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan sampai akhir 2019 tingkat literasi keuangan Indonesia mencapai 38,03% dengan Inklusi keuangan sebesar 76,19%. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil survey OJK 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29,7% dan indeks inklusi keuangan 67,8%. Dengan demikian dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan pemahaman keuangan (literasi) sebesar 8,33%, namun hal ini masih dinilai rendah dibandingkan dengan negara lain bahwa tingkat literasi keuangan Indonesia berada pada peringkat ke-14 dari total keseluruhan 16 negara. Hal ini menjelaskan bahwa pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai system keuangan dibawah negara-negara berkembang di Asia lainnya seperti Malaysia dan Vietnam.

Literasi keuangan menurut sumber dari Developing Indonesia Literacy Index (2013:4) dimensi keuangan dibagi menjadi dua bagian yaitu basic financial literacy dan advanced financial literacy. Basic financial literacy terdiri dari pengetahuan mengenai produk keuangan formal, Numeracy regarding finance (perhitungan keuangan), dan konsep dasar mengenai : inflasi, diskon, time value of money, money illusion. Sedangkan Advanced financial literacy terdiri dari pasar saham, bunga rata-rata dan harga obligasi, risiko saham dan obligasi, investasi, dan asset diversification.

Pengelolaan keuangan menjadi salah satu masalah utama dalam UMKM maupun Koperasi karena jika pengelolaan keuangan tidak berjalan dengan baik maka akan menghambat kinerja dan mendapatkan akses pembiayaan. Hal ini juga

sependapat dengan Risnanungsih (2017:42) mengatakan bahwa pengelolaan keuangan menjadi salah satu masalah yang seringkali terabaikan oleh para pelaku bisnis, khususnya berkaitan dengan penerapan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan dan akuntansi yang benar.

Dengan pengelolaan keuangan yang baik dan sehat, diharapkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan maupun koperasi baik pihak internal maupun eksternal turut serta dalam menjamin kelangsungan hidup perusahaan.

Hasil penelitian OJK (2013) menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan memiliki hubungan yang positif dengan tingkat pendapatan dan pendidikan. Hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengenai Analisis literasi keuangan menarik peneliti untuk melakukan penelitian ini, Hal ini dikarenakan masih relative sedikit penelitian tentang literasi keuangan dikalangan para pengelola keuangan pada koperasi , selain itu mengingat tingkat literasi keuangan di Indonesia masih kurang terutama bagi para pelaku UMKM dan Koperasi berdasarkan data OJK (2019) dari 59 juta pelaku UMKM di Indonesia baru sekitar 12% dari mereka yang memiliki akses ke layanan pinjaman karena minimnya akses dan pemahaman literasi keuangan.

Menurut penelitian terdahulu oleh Anggraeni (2015:28) bahwa tingkat literasi yang rendah mempengaruhi pemilik usaha dalam mengelola keuangan usaha dengan kemampuan yang hanya sebatas pada pencatatan. Begitu pula dengan hasil penelitian Ida dan Dwinta (2010:131) yang menyatakan bahwa

financial knowledge mempengaruhi seseorang dalam financial management behavior.

Hasil analisis laporan keuangan melalui rasio-rasio keuangan :

Tabel 1.1 Keadaan Rasio Likuiditas KKB IKOPIN Tahun 2015-2019

Tahun	Aktiva Lancar (Rp)	Hutang Lancar (Rp)	Rasio Likuiditas
2015	12.122.120.025	2.035.007.723	595,68%
2016	11.220.866.396	1.329.424.913	895,3%
2017	11.501.185.607	1.260.630.558	910,35%
2018	9.976.137.666	1.130.550.720	882,41%
2019	9.582.258.690	1.270.616.563	754,14%

Sumber: Laporan RAT KKB IKOPIN Tahun 2015-2019

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa likuiditas KKB IKOPIN selama 5 (lima) tahun berada dalam keadaan “likuid” karena melebihi standar yang telah ditetapkan dalam pedoman PerMen koperasi yaitu 200% sd >250%.

Berikut Tabel Rasio Solvabilitas yang tertulis pada Laporan RAT KKB IKOPIN :

Tabel 1.2 Rasio Solvabilitas KKB IKOPIN Tahun 2015-2019

Tahun	Total Aktiva (Rp)	Total Hutang (Rp)	Rasio Solvabilitas
2015	13.016.974.220	11.881.779.992	109,55%
2016	12.201.475.835	10.866.927.292	113,1%
2017	12.342.487.843	11.005.266.876	112,15%
2018	11.229.989.851	9.651.310.015	116,35%
2019	10.829.186.264	9.104.256.437	118,95%

Sumber: Laporan RAT KKB IKOPIN Tahun 2015-2020

Hasil perhitunga rasio solvabilitas berdasarkan standar dalam pedoman permen koperasi dapat dikatakan “buruk” karena melebihi standar yang telah ditetapkan dalam pedoman PerMen koperasi yaitu > 80%. Rasio solvabilitas dapat dikatakan sehat jika berada pada $\leq 40\%$

Berikut Tabel Rasio Rentabilitas yang tertulis pada Laporan RAT KKB IKOPIN :

Tabel 1.3 Rasio Rentabilitas KKB IKOPIN Tahun 2015-2019

Tahun	SHU Sebelum Pajak (Rp)	Modal Sendiri (Rp)	Rasio Rentabilitas
2015	169.043.930	1.135.194.228	14,89%
2016	227.128.557	1.356.880.680	16,74%
2017	202.224.930	1.562.355.497	12,94%
2018	195.127.792	1.578.679.846	12,36%
2019	381.408.416	1.904.929.827	24,16%

Sumber: Laporan RAT KKB IKOPIN Tahun 2015-2019

Pada tabel rasio rentabilitas diatas KKB IKOPIN termasuk kedalam kategori cukup baik dimana rasio rentabilitas menurut pedoman PerMen koperasi dapat dikatakan baik apabila apabila lebih dari 21%.

Dari hasil perhitungan rasio diatas ternyata ada kesalahan data yang diperoleh yaitu pada Sisa Hasil Usaha yang diterima KKB IKOPIN Pada tahun buku 2019.

Berikut Tabel Rasio Rentabilitas yang seharusnya tertulis pada laporan RAT KKB IKOPIN :

Tabel 1.4 Rasio Rentabilitas KKB IKOPIN Tahun 2015-2019

Tahun	SHU Sebelum Pajak (Rp)	Modal Sendiri (Rp)	Rasio Rentabilitas
2015	169.043.930	1.135.194.228	14,89%
2016	227.128.557	1.356.880.680	16,74%
2017	202.224.930	1.562.355.497	12,94%
2018	195.127.792	1.578.679.846	12,36%
2019	220.408.416	1.904.929.827	12,12%

Tabel diatas merupakan analisis laporan keuangan Koperasi Keluarga Besar Institut Manajemen Koperasi Indonesia melalui pendekatan rasio-rasio keuangan.

Mengingat koperasi adalah badan usaha yang berbeda dengan badan usaha milik kapitalis, maka pengukuran efisiensi koperasi harus dibedakan dengan perusahaan kapitalis. Perusahaan kapitalis yang berorientasi pada perolehan keuntungan yang besar, sangat tepat apabila mengukur efisiensi berdasarkan keuntungan (SHU) yang diperbandingkan dengan besarnya uang yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan tersebut. Koperasi yang berorientasi pada upaya memaksimalkan pelayanan kepada anggotanya sudah barang tentu tidaklah tepat jika hanya menggunakan kriteria keuntungan untuk mengukur efisiensi koperasi, tetapi lebih tepat bila memadukan keuntungan yang diperoleh koperasi dengan efek koperasi tersebut kepada anggotanya.

Koperasi yang berhasil adalah koperasi yang mampu mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi anggotanya dan dituntut untuk mampu memberikan manfaat bagi para anggotanya melalui pelayanan yang memuaskan. Kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh manajemen koperasi harus dapat dirasakan secara langsung dan tidak langsung oleh anggota sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pemberian manfaat ekonomi bagi anggotanya.

Menurut Andang K. Ardiwijaya (2001:128) manfaat ekonomi anggota terbagi menjadi dua jenis yaitu:

“Manfaat ekonomi langsung adalah manfaat ekonomi yang diterima langsung diperoleh pada saat terjadinya transaksi antara anggota dengan koperasi” sedangkan **“Manfaat ekonomi tidak langsung adalah manfaat ekonomi yang diterima oleh anggota bukan pada saat terjadinya transaksi**

dengan koperasi, melainkan diperoleh kemudian setelah berakhirnya suatu periode tertentu periode laporan keuangan dan pertanggungjawaban pengurus maupun pengawas, yakni berupa penerimaan sisa hasil usaha (SHU) bagian anggota.”

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sisa hasil usaha merupakan salah satu manfaat ekonomi anggota secara tidak langsung. Selain itu, koperasi juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi langsung kepada anggotanya melalui pelayanan harga yang lebih rendah dari non koperasi. Jika koperasi belum memberikan manfaat ekonomi bagi anggota, maka akan berdampak pada rendahnya partisipasi anggota.

Tabel 1.5 Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak KKB IKOPIN Tahun 2015-2019

Tahun	SHU Sebelum Pajak (Rp)
2015	169.043.930
2016	227.128.557
2017	202.224.930
2018	195.127.792
2019	220.408.416

Tabel diatas merupakan Sisa Hasil Usaha KKB IKOPIN sebelum pajak pada unit Ritel dan Simpan Pinjam.

Tabel 1.6 Kontribusi Sisa Hasil Usaha Unit Simpan Pinjam KKB IKOPIN Tahun 2019

USP 1	USP 2	USP 3	USP 4
(Rp 49.640.853)	Rp 65.225.746	Rp 50.809.562	Rp 92.494.976

Dari tabel 1.7 diatas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa kontribusi Sisa Hasil Usaha pada Unit Simpan Pinjam 1 minus Rp 49.640.853. menurut data

yang diperoleh salah satu factor penyebab terjadinya minus pada Unit simpan pinjam 1 adalah beban operasional yang tinggi dan adanya kredit macet, artinya hal ini cukup berdampak pada perolehan Sisa Hasil Usaha KKB IKOPIN.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis melihat adanya peluang untuk meneliti kondisi internal Koperasi dimana salah satunya adalah mengenai literasi keuangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan koperasi dan Manfaat kepada anggota. Sehingga penulis tertarik untuk menjadikan variabel ini sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Oleh karena itu penulis membuat penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana variabel diatas dapat meningkatkan pengelolaan keuangan pada koperasi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS LITERASI KEUANGAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAA KEUANGAN KOPERASI DAN MANFAATNYA KEPADA ANGGOTA”** pada Koperasi Keluarga Besar Insitut Manajemen Koperasi Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan dan untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka ditetapkan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Sejuahmana pengetahuan pengelolaan koperasi mengenai literasi keuangan dan faktor yang mempengaruhinya
2. Sejuahmana dampak pengetahuan pengelolaan keuangan koperasi terhadap kinerja keuangan koperasi
3. Bagaimana manfaat yang diterima anggota Koperasi
4. Upaya apa saja yang harus dilakukan mengenai literasi keuangan pada pengelola koperasi untuk pengambilan keputusan

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Peneliti memiliki maksud dan tujuan dalam penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis memiliki maksud untuk mencari, mengumpulkan dan memperoleh data serta informasi yang berhubungan dengan identifikasi masalah di Koperasi sekitar kampus Jatinangor.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam menjawab identifikasi masalah adalah bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengetahuan dan kemampuan pengelola koperasi mengenai literasi keuangan dan faktor yang mempengaruhinya

2. Mengetahui dampak pengetahuan pengelolaan keuangan koperasi terhadap kinerja keuangan koperasi
3. Mengetahui manfaat yang diterima anggota Koperasi
4. Mengetahui upaya yang harus dilakukan mengenai literasi keuangan pada pengelola koperasi untuk pengambilan keputusan

1.4.Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aspek pengembangan ilmu dan aspek guna laksana:

1.4.1.Aspek Pengembangan Ilmu

1. Bagi peneliti untuk memberikan wawasan dan pengetahuan juga penambahan ilmu pengetahuan mengenai manajemen keuangan dan pengaplikasian teori khususnya mengenai literasi keuangan dan pengelolaan keuangan.
2. Bagi peneliti lain dapat memberikan gambaran serta informasi mengenai aspek yang diteliti.

1.4.2.Aspek Guna Laksana

Bagi Koperasi diharapkan dari penelitian ini mampu memberikan manfaat serta gambaran mengenai literasi keuangan khususnya dalam meningkatkan pengelolaan keuangan dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan perencanaan keuangan di masa yang akan datang.